

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kemiskinan merupakan masalah ekonomi dan sering menjadi masalah serius di negara berkembang. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dimana kemiskinan menjadi salah satu masalah terbesar Indonesia. Setiap negara selalu mencari solusi terhadap masalah kemiskinan dan telah mengembangkan beberapa program. Semua negara mengakui bahwa keberhasilan program politik merupakan indikator pengentasan kemiskinan. Mengurangi jumlah orang miskin secara efektif adalah pilihan strategi dan alat pembangunan. Salah satu ciri terpenting dalam memilih bidang prioritas atau sector kunci bagi pembangunan nasional.

Kemiskinan diukur dengan menetapkan nilai standar kebutuhan pangan, dan non pangan yang harus dipenuhi seseorang untuk bisa hidup dengan baik. Standar ini digunakan untuk membedakan antara miskin dan tidak miskin. Indikator lain dari Badan Pusat Statistik (BPS) adalah kecukupan pangan atau kalori, yang menunjukkan kapan pengeluaran penduduk dapat menutupi kecukupan konsumsi pangan sebesar 2.100 kalori per hari dan memenuhi kebutuhan dasar non-gizi. Perumahan, sandang, perawatan kesehatan, pendidikan, akses kendaraan dan berbagai barang atau jasa umum yang mengarah pada penetapan upah minimum dan standar untuk memenuhi kondisi kehidupan yang baik di setiap daerah.<sup>2</sup>

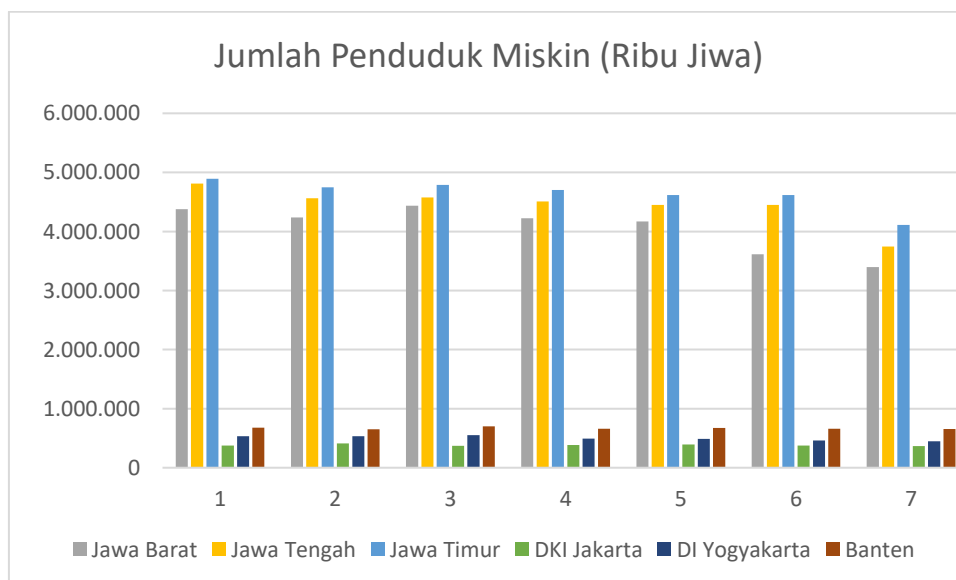
Pulau Jawa merupakan salah satu pulau yang ada di Indonesia yang terdiri dari enam provinsi, yaitu: Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa

---

<sup>2</sup> Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2015), hlm. 2-7

Timur, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Banten. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), dari tahun 2013 hingga 2019, rata-rata penduduk Pulau Jawa adalah 14.580.004 ribu jiwa, sedangkan rata-rata penduduk pulau Kalimantan adalah 5.69.741 ribu jiwa dan pulau Sumatera adalah 2.854.480 ribu jiwa. Pulau Jawa dibandingkan dengan pulau-pulau lain di Indonesia, seperti Kalimantan dan Sumatera memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi. Berikut informasi tentang persebaran penduduk miskin di Pulau Jawa.

**Grafik 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Di Jawa Tahun 2013-2019**



Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia, 2022<sup>3</sup>

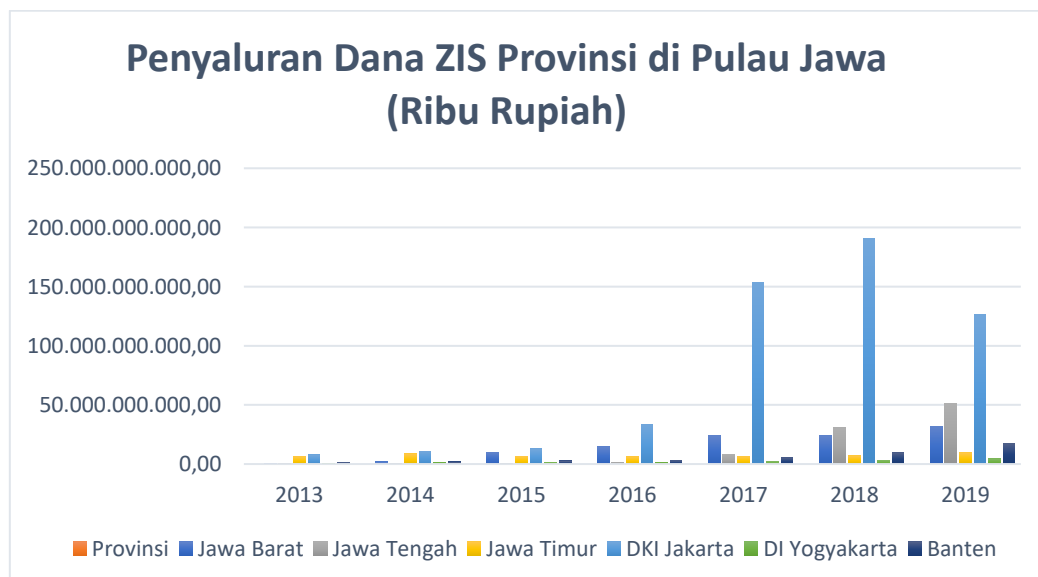
Berdasarkan pada tabel 1.1 menunjukkan data jumlah penduduk miskin di Jawa pada tahun 2013-2019 mengalami penurunan setiap tahunnya. Dari data diatas dapat dilihat bahwa penduduk miskin tertinggi ditempati oleh Provinsi Jawa Timur dengan jumlah 4.893.000 pada tahun 2013, kemudian mengalami penurunan berturut-turut pada setiap

<sup>3</sup> <http://www.bps.go.id> (diakses pada 25 Desember 2022)

tahunnya dari tahun 2013 hingga tahun 2019 menjadi 4.112.25 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk miskin terendah terdapat di Provinsi DKI Jakarta. Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada tahun 2013 sebanyak 357.700 jiwa, lalu mengalami penurunan pada setiap tahunnya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 dengan 365.55 jiwa.

Dilihat dalam konteks perekonomian, ZIS mempunyai peran sebagai alat pendistribusi kekayaan yang dimana dalam Islam dilarang seorang umat menimbun harta kekayaan dan dianjurkan agar harta tersebut dapat berputar terus ke arah yang produktif. Dengan adanya perputaran harta maka dapat meningkatkan output dan kesejahteraan masyarakat. Berikut tabel data penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah pada enam Provinsi di Jawa tahun 2013-2019:

**Grafik 1.2 Zakat, Infaq, Sedekah pada Provinsi di Jawa**

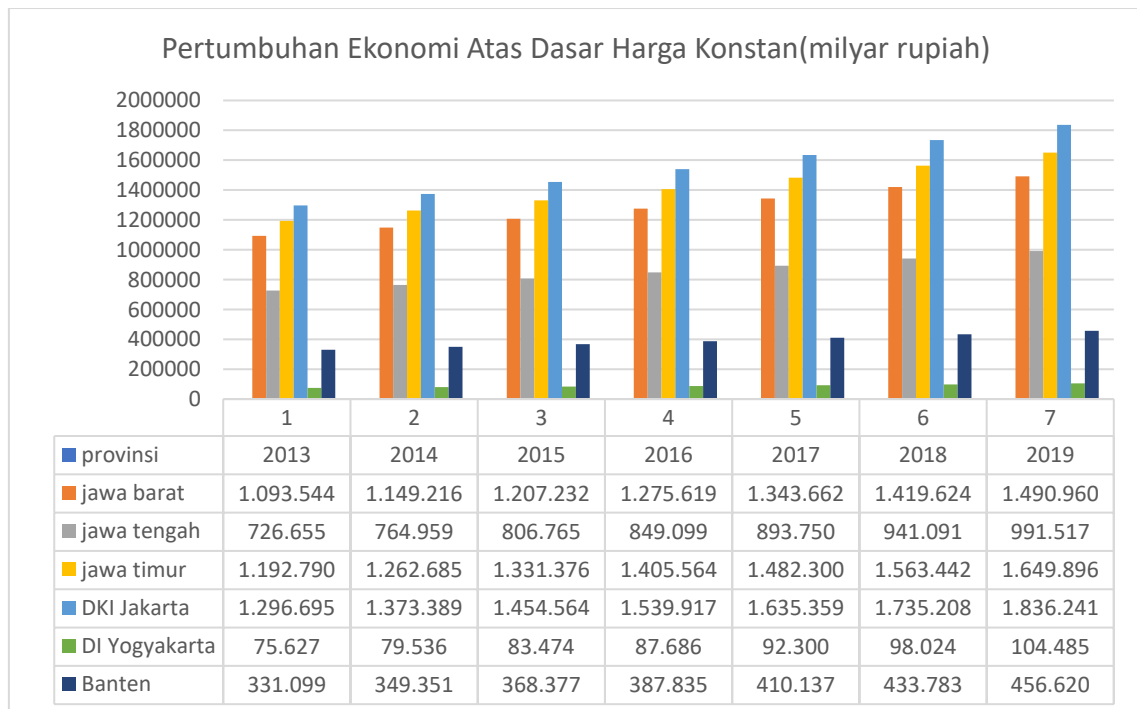


Sumber: Laporan keuangan Baznas berbagai Provinsi di Jawa, data diolah

Berdasarkan data Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) pada tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa penyaluran dana ZIS dari enam Provinsi di Jawa pada tahun 2013-2019 cenderung mengalami peningkatan meskipun ada beberapa provinsi pada tahun tertentu yang mengalami penurunan. Penyaluran dana ZIS terbesar berada pada Provinsi DKI Jakarta sebesar 190 milyar pada tahun 2018. Sedangkan untuk penyaluran dana ZIS terkecil sebesar 11.500.000 terjadi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2014.

Masalah berikutnya setelah kemiskinan dalam pembangunan suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya, pembangunan merupakan proses perubahan yang terus menerus untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, baik secara material maupun spiritual. Pertumbuhan ekonomi adalah masalah ekonomi jangka panjang, dan merupakan fenomena global. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai proses pertumbuhan output ekonomi dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi tercermin dalam perubahan *Gross Domestic Product* (GDP) pada setiap tahunnya.

Keberhasilan suatu wilayah ditandai dengan pertumbuhan ekonominya. Perkembangan ekonomi daerah menunjukkan hasil positif, dan hasil negative menunjukkan penurunan ekonomi. Dalam beberapa kurun waktu terakhir, Jawa merupakan penyumbang terbesar pada PDRB nasional. Berikut adalah data mengenai pertumbuhan ekonomi pada 6 provinsi di Jawa.

**Grafik 1.3 Pertumbuhan Ekonomi di Jawa tahun 2013-2019**

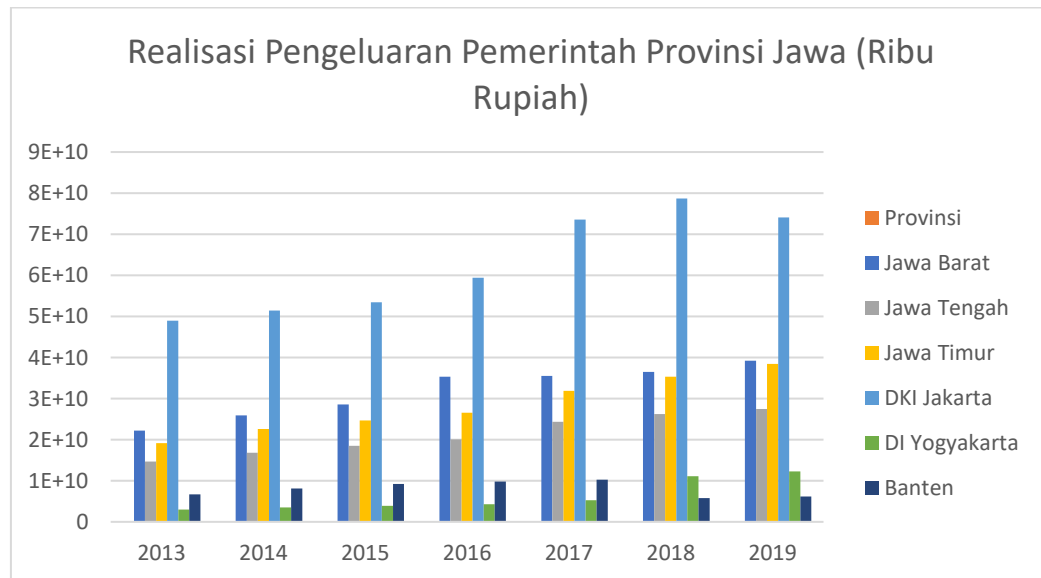
Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (2022)<sup>4</sup>, data diolah

Berdasarkan data pada tabel 1.3 bisa kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi pada 6 provinsi di Jawa dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan tiap tahunnya namun tidak terlalu signifikan. Namun ada juga beberapa provinsi yang mengalami penurunan.

Pengeluaran pemerintah dapat diartikan sebagai penggunaan uang ataupun sumber daya di sebuah negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan di negara ataupun pemerintahan yang berfungsi untuk mencapai kesejahteraan. Berikut adalah data pengeluaran pemerintah Provinsi di Jawa tahun 2013-2017.

<sup>4</sup> <https://www.bps.go.id> Diakses pada 25 Desember 2022

**Grafik 1. 4 Pengeluaran Pemerintah pada Provinsi Di Jawa**



Sumber: Badan Pusat Statistik, Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi<sup>5</sup>

Berdasarkan pada tabel 1.4 diatas menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pada enam provinsi di Jawa tahun 2013-2019 cenderung mengalami peningkatan. Pengeluaran pemerintah yang digunakan secara produktif dan terarah tentunya juga akan mampu untuk menaikkan tingkat pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Alasan penulis meneliti di Jawa karena jumlah penduduk miskin yang paling banyak terdapat di Jawa. Dan dengan banyaknya jumlah penduduk miskin di Jawa, maka jumlah mustahik yang ada di Jawa juga banyak. Sehingga, distribusi penyaluran dana ZIS dari BAZNAS akan sangat berguna untuk menurunkan tingkat kemiskinan yang ada di Jawa. Berdasarkan latar beakang tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah melihat sejauh mana pengaruh penyaluran dana ZIS, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Jawa. Untuk itu penulis, tertarik untuk melakukan

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik, *Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi* Diakses pada 25 Desember 2022

penelitian dengan judul “**Pengaruh Penyaluran Dana ZIS, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa**”.

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah penelitian supaya penelitian yang dilakukan memiliki ruang lingkup yang jelas. Terdapat beberapa masalah dalam penelitian yaitu:

1. Tingkat kemiskinan di Jawa lebih besar daripada Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera.
2. Pertumbuhan ekonomi di 6 Provinsi di Jawa mengalami kenaikan pada setiap tahunnya dari tahun 2013-2019.
3. Pengeluaran pemerintah di 6 Provinsi di Jawa pada tahun 2013-2019 mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Secara teori jika pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan maka pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan.
4. Penyaluran dana ZIS yang mengalami peningkatan setiap tahunnya diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di 6 Provinsi di Jawa.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh penyaluran dana ZIS terhadap tingkat kemiskinan di Jawa?
2. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Jawa?  
Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Jawa?
3. Bagaimana pengaruh penyaluran dana ZIS, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah secara simultan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini diarahkan untuk melakukan uji statistika tentang pengaruh penyaluran dana ZIS, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah di Jawa jadi tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji pengaruh penyaluran dana ZIS terhadap tingkat kemiskinan di Jawa.
2. Untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Jawa.
3. Untuk menguji pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Jawa.
4. Untuk menguji pengaruh penyaluran dana ZIS, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Jawa.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau nilai guna. Adapun manfaat dari hasil penelitian yang diharapkan penulis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan terutama mengenai penyaluran dana ZIS, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini bisa dijadikan masukan dan tolak ukur pemerintah dalam memberikan kebijakan untuk lebih memperhatikan situasi dan kondisi kemiskinan

- b. Peneliti Selanjutnya



Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk ide-ide penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan yang serupa, dan mampu meningkatkan kualitas peneliti selanjutnya, sehingga bisa menjadi lebih baik serta bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

## **F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti hanya membatasi ruang lingkup sebagai berikut:

### **1. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian merupakan suatu batasan yang memudahkan untuk dilaksanakannya suatu penelitian agar lebih efektif serta efisien untuk memisahkan aspek tertentu sebuah objek. Ruang lingkup dan batasan masalah yang diberikan dalam penelitian ini bertujuan untuk menghindari adanya pembahasan yang melebar dalam penelitian ini. Variabel yang akan diuji serta diteliti dalam penelitian ini yaitu berfokus pada variabel bebas ( $X$ ) dan variabel terikat ( $Y$ ), dimana variabel bebas yang dimaksud adalah ZIS (Zakat, Infak/*Shadaqah*) ( $X_1$ ), pertumbuhan ekonomi ( $X_2$ ), pengeluaran pemerintah ( $X_3$ ), sedangkan variabel terikatnya adalah kemiskinan ( $Y$ ).

### **2. Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan dalam penelitian ini tidak hanya meliputi terbatasnya waktu, dana, dan tenaga yang digunakan dalam melakukan penelitian ini. Namun juga terbatasnya variabel makro ekonomi yang menjadi indikator yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di 6 provinsi di Jawa Jadi dalam penelitian ini hanya berfokus pada penyaluran dana ZIS, pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran per kapita yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan pada Provinsi di Jawa.

## G. Penegasan Istilah

### 1. Definisi Konseptual

#### a. Variabel Bebas/Variabel Independen

Variabel bebas atau variabel *independen* adalah variabel yang menjadi penyebab adanya perubahan pada variabel lain:

##### 1) Zakat, Infak, *Shadaqah* (ZIS)

Zakat ialah hak berupa harta (tertentu) yang wajib ditunaikan dan diberikan kepada kelompok tertentu serta dalam waktu tertentu.<sup>6</sup> Infaq adalah mengatur atau mengeluarkan harta untuk memenuhi keperluan. Infaq dapat bermakna positif maupun negative.<sup>7</sup> Di dalam Al-Qur'an yang dimaksud infaq dalam hal kebaikan. Sedekah atau *shadaqah* merupakan suatu pemberian yang dengannya kita mengharapkan pahala dari Allah SWT, pemberian yang dimaksud yaitu dapat pemberian seperti harta ataupun pemberian perbuatan yang baik.<sup>8</sup>

- 2) Pertumbuhan Ekonomi adalah proses pertumbuhan output ekonomi dalam jangka panjang yang tercermin dalam *Gross Domestic Product* (GDP) setiap tahunnya.<sup>9</sup>
- 3) Pengeluaran Pemerintah digunakan untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan setiap golongan ekonomi rumah tangga.

#### b. Variabel Terikat/Variabel Dependen

Variabel terikat atau variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh adanya perubahan variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel

---

<sup>6</sup> Abdul Azis, *Manajemen Investasi Syariah*, Cet Ke-1, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 211.

<sup>7</sup> Wawan Shofwan Sholehuddin, *Risalah Zakat, Infak, Dan Sedekah*, (Bandung: Tim Tafakur, 2011), hlm. 19.

<sup>8</sup> Abdul Azis, *Manajemen Investasi Syariah*, Cet Ke-1, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 239

<sup>9</sup> Rinaldi Syahputra, Analisis Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, "JURNAL SAMUDRA EKONOMIKA", Vol 1 No. 2, Oktober 2017, hlm. 183.

dependennya adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.<sup>10</sup>

## 2. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi terhadap suatu variabel yang memberikan arti atau menyampaikan suatu operasional yang digunakan untuk mengukur suatu variabel.

### a. Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS)

Zakat merupakan harta tertentu yang dikeluarkan apabila sudah mencapai nishab.

Infaq merupakan harta yang dikeluarkan seseorang demi kemaslahatan umum sedangkan sedekah mempunyai cakupan yang lebih luas, tidak hanya mencakup materi

### b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian suatu negara yang memiliki dampak signifikan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

### c. Pengeluaran pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan yang dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli.

---

<sup>10</sup> Nursiah Chalid Dan Yusbar Yusuf, *Pengaruh Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Riau*, Jurnal Ekonomi, Vol 22 No 2, Juni 2014, hlm. 2

d. Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan.

## **H. Sistematika Skripsi**

Merujuk pada semua yang dituliskan di atas dan metode yang digunakan dalam rangka memudahkan penulisan skripsi, maka pembahasan dibagi menjadi enam bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisikan hal-hal pokok dalam penulisan skripsi yaitu latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

### **2. BAB II LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini menguraikan tentang teori yang membahas variabel/sub variabel pertama, variabel kedua, dan seterusnya, menguraikan penelitian yang terdahulu, kerangka konseptual, hipotesis penelitian.

### **3. BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini memuat tentang pendekatan dan jenis penelitian: populasi, sampling, dan sampel penelitian: sumber data, variabel dan skala pengukuran: teknik pengumpulan data dan analisis data.

### **4. BAB IV HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini terdiri dari hasil penelitian yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis serta temuan penelitian.

## **5. BAB V PEMBAHASAN**

Dalam bab ini bertujuan untuk menjawab masalah penelitian dan menjelaskan implikasi-implikasi dari hasil penelitian termasuk keterbatasan temuan penelitian.

## **6. BAB VI PENUTUP**

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan atas penelitian yang dilakukan dan saran-saran atas peneliti yang telah dilakukan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Hakekat Kemiskinan

##### 1. Definisi Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan.<sup>11</sup> Kemiskinan adalah suatu kondisi ketika individu atau sekumpulan orang mengalami ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya guna untuk bertahan hidup serta mengembangkan kehidupannya yang bermartabat. Yang termasuk sebagai kebutuhan dasar manusia yaitu: tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan serta terjaminnya rasa aman dari ancaman tindak kekerasan, dan mempunyai hak guna ikut serta dalam kehidupan social dan politik.<sup>12</sup>

Beberapa pakar ahli mendefinisikan kemiskinan dengan pemahaman yang berbeda-beda. Berikut definisi kemiskinan menurut beberapa pakar ahli:

- a. Benyamin White mengemukakan kemiskinan merupakan perbedaan kriteria dari tingkatan kesejahteraan masyarakat suatu wilayah dengan wilayah yang lain.<sup>13</sup>
- b. Sajogyo menyatakan bahwa kemiskinan merupakan tingkatan kehidupan seseorang yang berada di bawah standar kehidupan minimum yang telah

---

<sup>11</sup> *Ibid...*, hlm .2

<sup>12</sup> Irfan Syauqi Beik, Lily Dwi Arysanti, *Ekonomi Pembangunan Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2016), Hlm. 68.

<sup>13</sup> Dillon H.S dan Hermanto, *Kemiskinan Di Negara Berkembang Masalah Krusial Global*, (Jakarta: LP3ES), hlm. 10.

ditetapkan berdasarkan atas kebutuhan pokok, pangan yang membuat orang cukup bekerja dan hidup sehat berdasarkan atas kebutuhan.<sup>14</sup>

- c. Al Ghozali mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri

Dari beberapa definisi kemiskinan menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan suatu kondisi dimana seseorang memiliki kekurangan dan keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan pokok (sandang, pangan, papan) dan tidak dapat menikmati hidupnya dalam hal standar hidup yang layak. Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang tidak memiliki kemampuan, kebebasan, asset untuk memenuhi kebutuhan mereka pada waktu yang akan datang, serta sangat rentan terhadap resiko dan tekanan yang disebabkan oleh penyakit dan peningkatan secara tiba-tiba atas harga-harga bahan makanan dan uang sekolah.<sup>15</sup>

## 2. Jenis-Jenis Kemiskinan

Kemiskinan dibagi menjadi dua macam, yakni kemiskinan subjektif dan objektif. Kemiskinan merupakan kemiskinan yang berlaku secara individual. Kemiskinan jenis ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepemilikan sejumlah harta maupun dengan kemampuan mengeluarkan uang untuk mencukupi kebutuhan. Kemiskinan subjektif tidak dapat diukur, dan hanya dapat dirasakan yang bersangkutan saja.

---

<sup>14</sup> Hadi Prayitno dan Lincolin Arsyad, *Petani Desa Dan Kemiskinan*, (Yogyakarta: BPFPE, 1985), hlm.7

<sup>15</sup> Suparlan Parsudi, *Kemiskinan Perkotaan Dan Alternative Penanganannya Ditujukan Dalam Seminar Forum Perkotaan*, (Jakarta: Prasana Wilayah, 2000), hlm. 57

Kemiskinan objektif merupakan kemiskinan yang berhubungan dengan perasaan. Sedangkan kemiskinan objektif berhubungan dengan pandangan orang banyak. Seseorang dikatakan kaya jika orang tersebut merasa miskin dan dikatakan kaya jika orang tersebut merasa kaya, bukan karena orang lain mengatakan demikian. Tidak peduli seberapa banyak atau sedikit hartanya. Jika seseorang itu sudah merasa cukup dan tidak banyak lagi yang diperlukan, maka sebenarnya orang itu adalah orang kaya. Demikian pula, jika seseorang itu merasa belum cukup dan masih banyak kebutuhannya yang belum terpenuhi, orang tersebut sebenarnya miskin.<sup>16</sup>

### **3. Factor-Faktor Penyebab Kemiskinan**

Faktor-faktor yang menjadi penyebab kemiskinan dilihat dari segi ekonomi dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Secara mikro munculnya kemiskinan disebabkan karena adanya ketidaksamaan kepemilikan sumber daya sehingga menimbulkan distribusi pendapatan yang tidak merata. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dengan jumlah terbatas dan memiliki kualitas yang rendah.
- b. Kemiskinan muncul disebabkan oleh adanya sumber daya yang rendah sehingga menyebabkan produktivitas seseorang menjadi rendah dan menyebabkan rendahnya tingkat upah yang didapatkan. Rendahnya sumber daya manusia ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan atau keturunan.

---

<sup>16</sup> Suherman Rosyidi, *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikrok & Makro*, (Jakarta: PT Raja Grafindo persada, 2011), hlm. 146



- c. Kemiskinan muncul karena terdapat perbedaan dalam akses modal.<sup>17</sup>

Penyebab kemiskinan diatas bermuara pada teori lingkaran setan (*vicious circle of poverty*). yang dimaksud lingkaran kemiskinan adalah suatu lingkaran yang membentuk suatu rangkaian yang saling mempengaruhi satu sama lain sehingga menimbulkan suatu kondisi dimana suatu negara akan tetap miskin dan akan banyak mengalami kesukaran untuk mencapai tingkat pembangunan yang lebih baik.

## **B. Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS)**

### **1. Zakat**

#### **a. Definisi Zakat**

Secara bahasa, zakat memiliki beberapa arti diantaranya *al barakatu* (keberkahan), *al namaa* (perkembangan dan pertumbuhan), *ath thaharatu* (kesucian), *as shalahu* (keberesan). Secara terminology/istilah zakat berarti sejumlah harta tertentu yang telah memenuhi syarat yang bersifat wajib untuk dikeluarkan serta diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerima sesuai dengan persyaratan tertentu pula. Pengertian zakat menurut bahasa dan juga terminology/istilah mempunyai hubungan yang sangat erat dan nyata adalah harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi tumbuh, bersih, berkah, berkembang, bertambah, suci, serta baik.<sup>18</sup>

Terdapat beberapa syarat harta yang wajib dizakatkan antara lain: pertama, *al-milk at-tam* yang berarti harta dikuasai dimiliki secara penuh dan sah,

---

<sup>17</sup> Wahyu Hidayat, *Perencanaan Pembangunan Daerah: Pendekatan Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas, Pendapatan Dan Kemiskinan di Jawa Timur*, (Malang: Universitas Muhammadiyah, 2017), hlm. 94

<sup>18</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 2002), hlm. 7

dimana harta yang diperoleh merupakan hasil dari usaha, bekerja, ataupun pemberian yang sah, dimungkinkan dapat digunakan, dapat diambil manfaatnya, atau disimpan. Kedua, *an-namaa* merupakan harta yang berkembang dan mempunyai potensi seperti harta pertanian, perdagangan, peternakan dan lain-lain. Ketiga, harta yang telah mencapai nisab, harta ini telah mencapai ukuran tertentu. Keempat, telah melebihi kelebihan pokok. Kelima, telah mencapai satu tahun ataupun haul bagi harta tertentu seperti perdagangan.<sup>19</sup>

Zakat yang dikelola secara baik dapat membuka lapangan usaha serta lapangan pekerjaan dan penguasaan asset oleh umat islam. Menurut Yusuf al Qardhawi zakat ialah ibadah *maaliyah al ijtima'iyah*, yang berarti ibadah di bidang harta yang mempunyai fungsi strategis, penting dan membangun kesejahteraan masyarakat.

#### **b. Dasar Hukum Zakat**

Zakat merupakan salah satu yang termasuk dalam rukun islam. Zakat salah satu kewajiban bagi seorang yang beriman yang hartanya sudah mencapai nisab dan haul yang diberikan kepada seseorang mustahiq. Zakat merupakan suatu kewajiban dalam Islam yang mempunyai arti yang fundamental dan berkaitan dengan aspek keutuhan serta ekonomi social.<sup>20</sup>

Dijelaskan pada Q.S At-taubah ayat 103 yang berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm. 14

<sup>20</sup> Nuruddin Ali, *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 1

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ

Artinya:”Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.<sup>21</sup>

Pada Q.S At-Taubah ayat 103 yang menjelaskan bahwa tujuan dari seorang muslim untuk berzakat yaitu guna membersihkan serta mensucikan mereka. Dengan berzakat jiwa seorang muslim menjadi bersih dan suci. Dengan bersihnya jiwa serta berkah pada harta akan membuat manusia bahagia baik di dunia ataupun akhirat.

### c. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan berasal dari kata guna yang dapat diartikan sebagai manfaat dan daya yang dapat mendatangkan hasil maupun manfaat yang telah dicapai. Pendayagunaan zakat ini berkaitan erat dengan cara penyalurannya. Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 27 telah dijelaskan mengenai pendayagunaan zakat antara lain:

- 1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan meningkatkan kualitas umat.
- 2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan jika kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.

---

<sup>21</sup> Kemenag RI, *AL-QUR'AN DAN TERJEMAHANNYA: Edisi Penyempurnaan 2019*, hlm. 279

Dalam pendayagunaan zakat dapat dibedakan menjadi dua bentuk, antara lain:

- 1) Bentuk sesaat, dana produktif hanya diberikan satu kali kepada seseorang dan dalam penyalurannya tidak ada target terjadinya kemandirian ekonomi para mustahiq. Dikarenakan mustahiq tidak dapat mandiri lagi karena factor cacat fisik maupun umur. Sifat bantuan ini disebut juga hibah.
- 2) Bentuk pemberdayaan. Penyaluran dana produktif ini memiliki target untuk dapat merubah keadaan yang awalnya sebagai mustahik diharapkan dapat menjadi muzaki. Penyaluran dana produktif ini dapat berupa pemberian modal usaha kepada para mustahik. Penyaluran dana dalam pendayagunaan zakat produktif ini lebih diarahkan pada pemberdayaan ataupun usaha ekonomi yang diharapkan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan para mustahik.<sup>22</sup>

#### **d. Penyaluran Dana Zakat**

Zakat yang sudah terkumpul dan dikelola oleh Badan Amil Zakat harus segera disalurkan kepada orang yang berhak menerima/mutahiq. Terdapat beberapa golongan orang yang berhak untuk menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat antara lain:

- 1) Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta benda serta profesi yang mampu untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya sehari-hari.

---

<sup>22</sup> Lili Bariadi, Muhammad Zen, M Hudri, *Zakat & Wirausaha*, (Jakarta: Center of Entrepreneurship Development, 2005), hlm. 55

- 2) Miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan, namun penghasilannya tidak dapat untuk memenuhi kebutuhan hajat hidupnya.
- 3) Amil zakat adalah orang yang bertugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat kepada orang yang berhak menerima.
- 4) Muallaf adalah orang yang non islam yang kemudian masuk Islam.
- 5) Riqab adalah orang yang tidak merdeka, termasuk untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- 6) Gharimin (orang yang mempunyai hutang) adalah orang yang memiliki hutang untuk keperluan yang bukan maksiat dan tidak mampu untuk membayar hutang tersebut.
- 7) Fisabilillah adalah berjihad untuk kepentingan pertahanan Islam serta kaum muslimin.
- 8) Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan karena maksiat yang mendapat kesulitan pada saat perjalanan.<sup>23</sup>

Apabila zakat dapat dikelola dengan baik (pengambilan dan pendistribusian), maka hal ini dapat menanggulangi kemiskinan serta kefakiran. Jalan keluar yang harus dilakukan dalam pengoptimalan pengambilan serta pendistribusian zakat yaitu dengan meningkatkan kesungguhan serta profesionalitas kerja amil zakat yang mempunyai sifat jujur, amanah, bertanggung jawab, adil, dan dapat menjalankan tugasnya dengan menyalurkan dana ZIS tepat sasaran bagi mereka yang berhak menerima dana

---

<sup>23</sup> Ainul Yaqin, *Fiqh Ibadah Kajian Komprehensif Tata Cara Ritual Dalam Islam*, (Jawa Timur: Duta Media Publishing, 2016), hlm. 117

tersebut. Sehingga zakat yang tersalurkan dengan baik mampu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta dapat mengentaskan kemiskinan dan kefakiran.

**e. Peran Zakat dalam Perekonomian**

Dalam Islam terdapat larangan seorang umat menimbun harta serta membiarkan harta tersebut tidak produktif. Harta diharapkan dapat berputar terus ke arah yang produktif yang memberi faedah bagi pemilik harta maupun orang lain serta lingkungan yang ada di sekitar. Zakat memiliki fungsi yaitu sebagai alat untuk mendorong serta menjadikan harta seseorang supaya tetap produktif. Selain itu zakat juga dapat menjadikan perekonomian terus berputar. Dengan adanya perputaran harta ini maka akan terjadi peningkatan output (pertumbuhan ekonomi), dapat menyerap tenaga kerja, menambah pendapatan serta kesejahteraan penduduk.

Zakat dapat mendorong perekonomian baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Jika dalam pengelolaan zakat hanya sekedar memungut dan dibagikan ke yang berhak menerima saja maka ini akan bersifat jangka pendek. Dapat bersifat jangka panjang apabila zakat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi penerima zakat yang dapat meningkatkan pendapatan di masa yang akan datang dan dapat mengubah status mustahiq menjadi muzakki.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Muhammad Nafik Hadi Ryandono, *Ekonomi ZISWAQ (zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf)*, (Surabaya: IFDI dan Cenforis, 2008), hlm. 53-55

## 2. Definisi dan Dasar Hukum Infaq

Infaq berasal dari kata *anfaqa* yang dapat diartikan mengeluarkan sesuatu harta untuk suatu kepentingan. Nilai rezeki yang diinfakkan yaitu kelebihan dari keperluan. Termasuk juga di pengertian ini infak yang dikeluarkan oleh orang kafir untuk kepentingan agamanya. Secara terminology syariat infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta maupun penghasilan untuk kepentingan yang diperintahkan di dalam Islam.

Terdapat perbedaan antara infaq dengan zakat yaitu pada waktu mengeluarkannya, jika zakat ada nishabnya dan infaq tidak ada nishabnya. Infaq juga bisa dikeluarkan oleh semua orang, baik yang mempunyai pendapatan yang tinggi ataupun berpendapatan rendah. Infaq dapat diberikan kepada siapapun sedangkan zakat harus diberikan kepada 8 orang ashnaf. Infaq tidak ditentukan jumlahnya, jenisnya ataupun kadarnya.<sup>25</sup>

## 3. Definisi dan Dasar Hukum Sedekah

Sedekah berasal dari kata *shadaqah* yang mempunyai arti benar, yang mempunyai maksud shadaqah merupakan wujud dari keimanan dan ketaqwaan seseorang, yang berarti orang yang menyukai sedekah ialah orang yang membenarkan pengakuan imannya melalui amal perbuatan yang positif. Secara terminology syariat, sedekah sama dengan infaq, termasuk hukum serta ketentuan yang ada di dalamnya. Perbedaan infaq berkaitan dengan hal materi sedangkan sedekah mempunyai arti yang luas yang menyangkur hal yang sifatnya nonmaterial juga.<sup>26</sup> Secara umum, sedekah dapat diartikan pemberian dari

---

<sup>25</sup> Hafidhuddin, *Panduan Praktis...*, hlm. 14-15

<sup>26</sup> Hafidhuddin, *Panduan Praktis...*, hlm. 15

seseorang muslim dengan sukarela tanpa danya batas waktu, jumlah sebagai kebaikan dan hanya mengharap ridho dari Allah.

Dasar hukum dari shadaqah terdapat pada Q.S Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.<sup>27</sup>

Secara hukum sedekah dapat dibedakan menjadi dua, yang pertama yaitu sedekah wajib, yang merupakan kategori dari sedekah wajib yaitu zakat. Sedangkan yang kedua yaitu sedekah tidak wajib, yaitu dikategorikan infaq. Zakat wajib dikeluarkan apabila sudah mencapai nishab sedangkan infaq boleh dikeluarkan secara sukarela baik harta yang dimiliki tersebut telah ataupun belum mencapai syarat.

#### **4. Hubungan Penyaluran Dana ZIS Terhadap Kemiskinan**

Hubungan penyaluran dana ZIS dengan kemiskinan dalam teori Keynes menyatakan bahwa masalah kemiskinan muncul karena adanya paradox masalah ekonomi bernama “*proverty in the midst of plenty*” yang artinya kemiskinan di tangan kelimpahan, dimana Keynes memungkinkan ketidakstabilan endogen dan melihat bahwa fungsi tak terkekang tenaga kerja dan pasar modal menanamkan kuar kecenderungan kliring pasar. Penekanan Keynes pada ketidakseimbangan antara konsumsi masyarakat dan produksi permintaan

---

<sup>27</sup> Kemenag RI, *AL-QUR'AN DAN TERJEMAHANNYA Edisi Penyempurnaan*, 2019, hlm. 53



masyarakat sehingga memunculkan ketimpangan yang mendorong kelompok terpinggirkan.<sup>28</sup>

Pada aliran Keynesian, program kesejahteraan dan *Welfare State* sangat mementingkan campur tangan pemerintah, hal ini dikarenakan peran pemerintah dalam mengatur serta mengarahkan kegiatan ekonomi baik dari skala kecil seperti individu-individu hingga skala menengah dan besar seperti firma-firma dalam memberikan subsidi pendapatan untuk menunjang kesejahteraan warga negaranya terbilang cukup besar. Secara timbal-balik atau sebab-akibat, dimana penentangan terhadap globalisasi merupakan akibat dari adanya ketimpangan pendistribusian pendapatan yang menyebabkan terjadinya liberalisasi perdagangan.

Hal ini berarti kesenjangan pendapatan semakin melebar sehingga menimbulkan ketimpangan standar hidup yang melahirkan kelompok terpinggirkan (negara berkembang) dan secara ekonomi akan tertindas dan bergerak menghantam arus globalisasi.<sup>29</sup> Keynes mengemukakan pembenahan instabilitas perekonomian perlu dilakukan pemerintah. Apabila penyaluran dana ZIS dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran bagi mereka yang berhak menerima dana tersebut. Maka meningkatkan pendapatan mustahik serta dapat mengurangi kemiskinan.

---

<sup>28</sup> Rima, I.H, *Development of Economic Analysis Sixth Edition*, London and New York: Taylor & Francis Group

<sup>29</sup> P. Krugman, *The General of Theory Employment, Interest, and Money. In: The General Story*, hlm. 27

## C. Pertumbuhan Ekonomi

### 1. Definisi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi menurut Kuznet, adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya. Kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukannya.<sup>30</sup>

Definisi ini memiliki 3 (tiga) komponen utama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa dilihat dari meningkatnya secara terus-menerus persediaan barang; teknologi maju merupakan factor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan kemampuan dalam menyediakan aneka macam barang pada penduduk; ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan adanya penyesuaia di bidang kelembagaan dan ideology sehingga inovasi yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan umat manusia dapat dimanfaatkan secara tepat.

Boediono, mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan pendapatan perkapita yang terus menerus dalam jangka waktu yang lama. Dalam

---

<sup>30</sup> M.L Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm.123

pengertian ini teori tersebut harus mencakup teori mengenai pertumbuhan GDP dan teori mengenai pertumbuhan penduduk. Sebab apabila hanya kedua aspek tersebut dijelaskan, maka perkembangan output bisa dijelaskan. Kemudian aspek yang ketiga adalah pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka panjang, yaitu apabila selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut output perkapita menunjukkan kecenderungan yang meningkat.<sup>31</sup>

## **2. Factor-Faktor Yang Menentukan Pertumbuhan Ekonomi**

Terdapat beberapa factor-faktor pertumbuhan ekonomi. Proses pertumbuhan ekonomi ditentukan dan dipengaruhi oleh beberapa factor, sebagai berikut:

### **a. Tanah dan kekayaan alam lainnya**

Factor kekayaan alam akan mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonomian suatu negara, terutama pada masa-masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi. Apabila negara tersebut mempunyai kekayaan alam yang dapat diusahakan dengan menguntungkan, hambatan-hambatan tersebut akan dapat diatasi dan pertumbuhan ekonomi dipercepat.

### **b. Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja**

Bertambahnya penduduk akan mendorong jumlah tenaga kerja dan penambahan tersebut memungkinkan negara tersebut menambah produksi. Di samping itu akibat pendidikan, latihan dan pengalaman kerja, keterampilan penduduk akan selalu bertambah tinggi. Hal tersebut akan menyebabkan bertambahnya produktivitas dan juga menimbulkan pertambahan produksi yang lebih cepat daripada pertumbuhan tenaga kerja.

---

<sup>31</sup> *Ibid...*, hlm. 34

c. Barang-barang modal dan tingkat teknologi

Pada masa ini pertumbuhan ekonomi dunia telah mencapai tingkat yang lebih tinggi, yaitu jauh lebih modern daripada kemajuan yang dicapai oleh suatu masyarakat yang masih belum berkembang. Barang-barang modal yang sangat banyak jumlahnya, dan teknologi yang telah menjadi bertambah modern memegang peranan yang penting sekali dalam mewujudkan kemajuan ekonomi yang tinggi. Sebab, apabila barang-barang modal saja yang bertambah, sedangkan tingkat teknologi tidak mengalami perkembangan, maka kemajuan yang akan dicapai adalah jauh lebih rendah daripada yang dicapai pada masa kini. Dengan begitu, tanpa adanya perkembangan teknologi, produktivitas barang-barang modal tidak akan mengalami perubahan dan tetap berada pada tingkat yang sangat rendah.

d. Sistem sosial dan sikap masyarakat

Dalam menganalisis mengenai masalah-masalah pembangunan di negara-negara berkembang para ahli ekonomi telah menunjukkan bahwa system social dan sikap masyarakat dapat menjadi penghambat yang serius dalam pembangunan. Sikap masyarakat juga dapat menjadi penentu sampai sejauh mana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. Apabila di dalam masyarakat terdapat beberapa keadaan dalam system social dan sikap masyarakat yang menghambat pertumbuhan ekonomi, pemerintah haruslah berusaha untuk menghapuskan hambatan-hambatan tersebut.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Sadono Sukirno, *Makro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 429

### 3. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi mempelajari factor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi di sebuah negara atau wilayah. Terdapat banyak factor, sehingga banyak bermunculan teori tentang pertumbuhan ekonomi. Berikut ini teori-teori tentang pertumbuhan ekonomi:

#### a. Teori Pertumbuhan Klasik

Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik ada empat factor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu: jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Meskipun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada banyak factor, ahli-ahli ekonomi klasik terutama menitikberatkan perhatiannya kepada pengaruh penambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi. Hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ini berarti pertumbuhan ekonomi tidak akan terus menerus berlansung.

#### b. Teori Schumpeter

Dalam teori Schumpeter menekankan tentang pentingnya peranan pengusaha di dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi dalam teori tersebut menunjukkan bahwa para pengusaha merupakan golongan yang akan terus-menerus membuat pembaharuan atau inovasi dalam kegiatan ekonomi. Inovasi tersebut meliputi: memperkenalkan barang-barang baru, mempertinggi efisiensi cara memproduksi dalam menghasilkan suatu barang, memperluas pasar suatu barang ke pasaran-pasaran yang baru, mengembangkan sumber barang, bisa berupa yang baru dan mengadakan

perubahan-perubahan dalam organisasi dengan tujuan mempertinggi keefisienan kegiatan perusahaan. Berbagai kegiatan inovasi akan memerlukan investasi baru.

Menurut Schumpeter makin tinggi tingkat kemajuan suatu ekonomi semakin terbatas kemungkinan untuk mengadakan inovasi. Maka pertumbuhan ekonomi akan menjadi bertambah lambat jalannya. Pada akhirnya akan tercapai tingkat “keadaan tidak berkembang” atau “*stationary state*”. Dalam pandangan Schumpeter keadaan tidak berkembang itu dicapai pada tingkat pertumbuhan yang tinggi.

c. Teori Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar bertujuan untuk menerangkan syarat yang harus dipenuhi supaya suatu perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang teguh atau *steady growth* dalam jangka panjang. Analisis Harrod-Domar menggunakan pemisalan-pemisalan sebagai berikut: (1) Barang modal telah mencapai kapasitas penuh; (2) Tabungan adalah proporsional dengan pendapatan nasional; (3) Rasio modal-produksi (*capital-output ratio*) tetap nilainya; (4) Perekonomian terdiri dari dua sector.<sup>33</sup>

d. Teori Pertumbuhan Neo-Klasik

- 1) Teori pertumbuhan Neo-Klasik pada dasarnya bertujuan untuk menerangkan factor-faktor utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi dan sumbangan relative dari berbagai factor ini dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Dalam teori Neo-Klasik ditunjukkan bagaimana tiga jenis input yaitu modal, teknologi dan tenaga kerja menentukan tingkat kegiatan ekonomi, dan peranan dari modal dan perkembangan teknologi dalam menentukan pertumbuhan ekonomi. Untuk menerangkan teori

---

<sup>33</sup> Jolyne Myrell Parera, *Aglomerasi Perekonomian di Indonesia*, (Malang: CV IRDH, 2017), hlm.

pertumbuhan Neo-Klasik. Uraian dalam bagian ini akan dibedakan kepada empat tingkat analisis, yaitu: (1) Menunjukkan pandangan teori pertumbuhan Neo-Klasik dengan terlebih dahulu memisalkan tidak terdapat perkembangan teknologi, yaitu tingkat teknologi dianggap konstan; (2) Menunjukkan tabungan, investasi dan konsumsi pada setiap tingkat pertumbuhan ekonomi; (3) Melihat efek depresiasi dan penambahan penduduk ke atas pertumbuhan ekonomi.

Menunjukkan bagaimana perkembangan teknologi akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.<sup>34</sup>

e. Teori Pertumbuhan Baru/Pertumbuhan Endogen

Teori pertumbuhan endogen atau disebut juga teori pertumbuhan baru ini dikembangkan oleh Paul Romer. Teori ini menganggap pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh system produksi, bukan oleh kekuatan dari luar system. Akumulasi modal secara luas dapat diartikan bukan saja dalam modal fisik namun juga modal nonfisik. Maksud dari modal diperluas dengan memasukkan sumber daya manusia dan juga pengetahuan. Untuk mencapai pertumbuhan endogen ini lebih menekankan pentingnya tabungan serta investasi modal manusia.

Pertumbuhan baru/endogen lebih menyarankan adanya peran aktif kebijakan public agar dapat menjalankan pembangunan ekonomi melalui investasi dalam pembentukan modal manusia dan mendukung investasi swasta asing di dalam industry padat pengetahuan seperti *software* computer serta telekomunikasi untuk

---

<sup>34</sup> Sattar dan Silvana Kardinar Wijayanti, *Buku Ajar Teori Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 51

meningkatkan produktivitas. Jika terjadi peningkatan produktivitas maka juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.<sup>35</sup>

#### **4. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan**

Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan dapat dijelaskan dengan teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Harold Domar yang menyatakan bahwa untuk memacu pertumbuhan ekonomi dibutuhkan investasi baru. Investasi baru tersebut bisa berasal dari keuntungan perusahaan yang digunakan kembali untuk investasi, sehingga semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dapat menciptakan lapangan kerja yang akan mengurangi angka kemiskinan.<sup>36</sup>

Dalam teori *Trickel-down effect* menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dalam bentuk peningkatan kesempatan kerja atau pengurangan pengangguran dan peningkatan upah/pendapatan memberikan efek yang menguntungkan kepada kelompok miskin, pertumbuhan ekonomi bisa menjadi suatu alat yang efektif bagi pengurangan kemiskinan.<sup>37</sup>

#### **D. Pengeluaran Pemerintah**

##### **1. Definisi Pengeluaran Pemerintah**

Menurut Mangkoesobroto pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Jika pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang serta jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang dikeluarkan oleh suatu pemerintahan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.<sup>38</sup> Pengeluaran pemerintah

---

<sup>35</sup> Michael P. Todaro, *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hlm. 182-185

<sup>36</sup> Jolyne Myrell Parera, *Aglomerasi Perekonomian Di Indonesia*, (Malang: CV IRDH, 2007), hlm. 14

<sup>37</sup> Tulus H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, (Ghalia Indonesia: Bogor, 2018), hlm. 113

<sup>38</sup> Guritno Mangkoesobroto, *Ekonomi Public Edisi 3*, (Yogyakarta: BPFE, 2008), hlm. 169



dapat diartikan sebagai penggunaan uang ataupun sumber daya di sebuah negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan di negara maupun pemerintahan yang berfungsi untuk mencapai kesejahteraan.<sup>39</sup>

Pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*) merupakan salah satu kebijakan fiskal, yaitu tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan menentukan besar atau kecilnya penerimaan ataupun pengeluaran pemerintah di setiap tahun dan tercermin di dokumen APBN nasional serta APBN daerah. Kebijakan fiskal ini bertujuan menstabilkan harga, tingkat output atau kesempatan kerja serta dapat memacu pertumbuhan ekonomi.

Pengeluaran pemerintah merupakan sebuah instrument yang digunakan mengukur besarnya peran pemerintah ataupun pihak swasta. Pengeluaran pemerintah juga digunakan untuk menentukan jumlah pengeluaran agregat ataupun dalam jangka pendek sebagai penentu pertumbuhan GNP riil.<sup>40</sup>

## **2. Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Peningkatan Pengeluaran Pemerintah**

Menurut Sadono Sukirno, terdapat dua factor yang dapat mempengaruhi dalam peningkatan pengeluaran pemerintah yaitu sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. Factor yang bersifat ekonomi, yaitu factor yang mempunyai hubungan dengan tujuan untuk mencapai penggunaan *full employment* tanpa menyebabkan

---

<sup>39</sup> Detri Karya Dan Syamri Syamsudin, *Makroekonomi: Pengantar Untuk Manajemen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm, 179

<sup>40</sup> Saharudin Didu dan Nurul Islamiah, Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Banten, *Jurnal Ekonomi-Qu*, Vol.7, No.1, April 2017, hlm. 78

<sup>41</sup> Marzuki Ilyas, *Ilmu Keuangan Negara (Public Finance)*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989), hlm. 40

adanya inflasi sehingga pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan baik dan benar.

- b. Factor yang bersifat politik dan social, merupakan factor yang menggunakan pengeluaran yang besar. Seperti halnya menjaga keamanan serta ketahanan negara, melakukan bantuan social, menjaga stabilnya politik, serta lain sebagainya yang berhubungan dengan politik dan social.

### **3. Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah**

Pengeluaran pemerintah dapat dibedakan menjadi dua macam antara lain;

#### **a. Pengeluaran Rutin**

Pengeluaran rutin merupakan pengeluaran yang dikeluarkan secara rutin setiap tahun yang pemerintah lakukan agar berjalannya penyelenggaraan serta terpeliharanya roda pemerintahan. Pengeluaran rutin ini terdiri dari belanja pegawai yaitu untuk membayar gaji para pegawai seperti gaji utama dan tunjangan, belanja barang yaitu untuk membeli barang yang berguna untuk penyelenggaraan pemerintah setiap hari, subsidi, pembayaran angsuran dan bunga utang negara, dan pengeluaran rutin lainnya. Melalui pengeluaran rutin, pemerintah bisa menjalankan misinya untuk menjaga lancarnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan operasional serta pemeliharaan asset negara, pemenuhan kewajiban pemerintah terhadap pihak ketiga, perlindungan untuk masyarakat kurang mampu/misn dan mampu menjaga kestabilan ekonomi.

#### **b. Pengeluaran Pembangunan**

Pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang mempunyai kegunaan untuk membiayai pembangunan di bidang ekonomi, social, dan umum

yang sifatnya menambah modal masyarakat baik dalam bentuk prasarana fisik ataupun non fisik. Anggaran pembangunan harus disesuaikan dengan dana yang dimobilisasi. Dana akan dialokasikan di berbagai jenis bidang yang sesuai dan dengan prioritas yang sudah terencana. Anggaran pembangunan bertujuan menciptakan kondisi stabil serta kondusif bagi proses pemulihan ekonomi dan akan memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi nasional di waktu yang akan datang.<sup>42</sup>

Pada tahun 2006 struktur pengeluaran pemerintah mengalami perubahan menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yaitu:<sup>43</sup>

- a. Belanja Langsung, belanja yang dianggarkan secara langsung dengan pelaksanaan program yang terdiri dari belanja pegawai, belanja modal, belanja barang jasa untuk menjalankan program ataupun kegiatan yang sudah dianggarkan oleh pemerintah.
- b. Belanja Tidak Langsung, belanja yang dianggarkan secara tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai yang berupa gaji pokok serta tunjangan, belanja bunga, subsidi, belanja bantuan social, belanja hibah, belana bagi hasil kepada Provinsi/ Kabupaten dan Kota serta Pemerintahan Desa, belanja tidak terduga, dan belanja bantuan keuangan.

Pengeluaran pemerintah menurut sifatnya dapat dibagi menjadi 5 yaitu:

- (1) Pengeluaran investasi merupakan pengeluaran yang berfungsi untuk memperkuat serta menambah ketahanan ekonomi di waktu yang akan datang.

---

<sup>42</sup> T. Giarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 377

<sup>43</sup> Fadillah Amin, *Pengangguran Di Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Teoritis, Normative, Dan Empiris*, (Malang: UB Press, 2019), hlm. 22

Seperti pengeluaran yang digunakan untuk membangun pelabuhan, jalan tol, bandara, peningkatan SDM, dan lain sebagainya; (2) Pengeluaran penghematan masa depan yaitu pendapatan yang secara tidak langsung memberikan manfaat, tetapi jika dikeluarkan akan mengurangi pengeluaran pemerintah lebih besar di waktu yang akan datang. Seperti pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk pendidikan, kesehatan serta anak yatim, dan lain sebagainya; (3) Pengeluaran penciptaan lapangan pekerjaan; (4) Pengeluaran yang tidak produktif, pengeluaran ini diperlukan oleh pemerintah namun tidak memberikan manfaat kepada masyarakat. Seperti pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk kepentingan perang, dan; (5) Pengeluaran kesejahteraan rakyat, merupakan pengeluaran yang membuat masyarakat menjadi sejahtera. Seperti pengeluaran yang digunakan untuk membangun tempat rekreasi, bantuan langsung tunai, bantuan bencana, bantuan subsidi.<sup>44</sup>

#### **4. Teori Pengeluaran Pemerintah**

##### **a. Teori Rostow dan Musgrave**

Teori pengeluaran pemerintah ini dikemukakan oleh Rostow dan Musgrave. Secara umum Rostow dan Musgrave mengembangkan teori yang menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan tahapan pembangunan ekonomi, antara lain terdiri dari tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal ini pengeluaran pemerintah untuk investasi persentasenya cukup besar, dikarenakan pemerintah harus menyediakan prasarana seperti pendidikan, transportasi, kesehatan dan lain sebagainya. Pada tahap menengah investasi

---

<sup>44</sup> Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi...*, hlm. 379

pemerintah dan swasta sudah semakin berkembang, pemerintah masih memegang peran yang besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat lepas landas. Di tahap lanjut aktivitas pemerintah dalam pembangunan ekonomi beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran untuk kesejahteraan social misalnya program jaminan hari tua, program kesehatan untuk masyarakat.<sup>45</sup>

b. Teori Peacock dan Wiseman

Dalam teori ini pemerintah selalu berusaha untuk memperbesar pengeluaran dengan mengandalkan penerimaan pajak sedangkan masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang kian tinggi dan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang membesar. Peacock dan Wiseman menyatakan perkembangan ekonomi mengakibatkan pemungutan pajak yang mengalami peningkatan meskipun tarif pajak tidak mengalami perubahan. Meningkatnya penerimaan pajak akan mengakibatkan pengeluaran pemerintah ikut mengalami peningkatan. Oleh sebab itu, pada kondisi normal, terjadinya peningkatan GNP menyebabkan penerimaan pemerintah juga kian besar dan pengeluaran pemerintah juga akan besar.

c. Teori Wagner

Menurut teori Wagner di dalam suatu perekonomian, jika pendapatan perkapita mengalami peningkatan, maka secara realtif pengeluaran pemerintah akan ikut meningkat. Menurut Wagner peranan pemerintah dapat menjadi besar dikarenakan pemerintah mempunyai tugas mengatur suatu hubungan yang timbul di masyarakat, hukum, pendidikan, dan lain-lain.

---

<sup>45</sup> Guritno Mangkoesobroto, *Ekonomi Publik*, (Yogyakarta: BPF, 2010), hlm. 120

d. Teori Keynes

Teori pengeluaran pemerintah menurut Keynes bahwa pendapatan total perekonomian pada jangka pendek ditentukan oleh perusahaan, rumah tangga, serta pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya. Pengeluaran agregat ini dibedakan menjadi empat unsur antara lain konsumsi rumah tangga, pengeluaran pemerintah, investasi swasta dan juga ekspor. Keseimbangan dari pendapatan dapat dicapai saat keadaan  $Y = C + I + G$ .<sup>46</sup> dapat dicapai saat keadaan  $Y = C + I + G$ .<sup>47</sup>

## 5. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan

Hubungan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan dijelaskan dalam teori-teori yang dikemukakan para ekonomi klasik seperti Rostow dan Musgrave, Peacock dan Wiseman, Wagner, dan Keynes. Berdasarkan pada pemikiran para ekonom klasik tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintah mempunyai peranan yang sangat besar dalam mengatur suatu hubungan yang timbul di masyarakat. Langkah awal pertumbuhan ekonomi memerlukan persentase yang besar pada investasi pemerintah terhadap jumlah investasi yang tersedia sebab pada langkah awal ini pemerintah harus mempersiapkan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lainnya. Dampak dari pengeluaran pemerintah tersebut melalui investasi pada sarpras yang diperlukan dapat memicu peningkatan output serta mengurangi total kemiskinan yang terjadi.

---

<sup>46</sup> Guritno Mangkoesebroto, *Ekonomi Publik*, (Yogyakarta: BPFE, 2010), hlm. 179

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 179

## **E. Kajian Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dapat dijadikan referensi oleh penulis untuk melakukan penelitian ini sehingga dapat menjadi suatu penelitian yang terkait satu sama lain. Penelitian terdahulu juga dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan penelitian-penelitian. Berikut ini terdapat beberapa referensi penelitian terdahulu yang digunakan untuk menyusun penelitian ini:

### **1. Penelitian Tentang Penyaluran Dana ZIS Terhadap Kemiskinan**

Penelitian yang dilakukan oleh Haidar, dengan judul penelitian revitalisasi pendistribusian zakat produktif sebagai upaya pengentasan kemiskinan di era modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui distribusi zakat produktif dalam bentuk modal usaha yang dilakukan oleh BAZNAS Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya pengentasan kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan. Adapun metode penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengimplentasian modal zakat produktif berdampak positif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan pendapatan serta melahirkan wirausahawan baru. Oleh karena itu, program penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS kota Yogyakarta perlu terus dilakukan sembari meningkatkan kualitas pengelolaannya serta sumber dayanya.<sup>48</sup> Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu terletak pada objek penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu 6 Provinsi yang ada di Pulau

---

<sup>48</sup> M. Samsul Haidir, Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Era Modern, *Jurnal Muqtasid 10 (01)*, 2019, UIN Sunan Kalijaga

Jawa serta tahun yang dilakukan oleh peneliti yakni tahun 2013-2019 dan metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi data panel.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Wahyuningsih dan Makhrus dengan judul penelitian pengelolaan zakat produktif dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Banyumas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis menggunakan data primer berupa data laporan tahunan BAZNAS dan LAZISMU Kabupaten Banyumas serta menggunakan teori pendekatan (CIBEST) *Center for Islamic bussines dan economic studies*. Berdasarkan pendekatan CIBEST menunjukkan bahwa program pembedayaan terdapat peningkatan jumlah pendapatan usaha, stimulant, kesadaran spiritual, dan perubahan paradig pada *mustahik*. Hambatan yang dihadapi organisasi pengelola zakat di Kabupaten Banyumas dalam pengentasan kemiskinan yakni kurangnya koordinasi dengan mitra program pemberdayaan, lemahnya pengawasan serta kurangnya sumber daya manusia.<sup>49</sup> Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu terletak pada objek penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu 6 Provinsi yang ada di Pulau Jawa serta tahun yang dilakukan oleh peneliti yakni tahun 2013-2019 dan

---

<sup>49</sup> Septi Wahyuningsih, M. Makhrus, "Pengelolaan Zakat Produktif Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Banyumas", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 2 No.2*, Oktober 2019



metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi data panel.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Munandar, yang berjudul Pengaruh Penyaluran Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan, dimana dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel ZIS (zakat, infaq, dan sedekah) memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 2006-2017.<sup>50</sup> Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu terletak pada objek penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu 6 Provinsi yang ada di Pulau Jawa serta tahun yang dilakukan oleh peneliti yakni tahun 2013-2019 dan metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi data panel.

Penelitian Yuliana, et al yang berjudul “Pengaruh Dana Zakat Infak Dan Sedekah (ZIS) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2013-2017”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Aceh. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dengan menggunakan Eviews 9. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hasil bahwa dana ZIS memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Aceh.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Eris, Dkk, “Pengaruh Penyaluran Zakat, Infaq, Dan Sedekah (ZIS) Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan”, *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, Vol. 01 No. 01, Februari 2020, hlm.1

<sup>51</sup> Yuliana, Yullfrida, dkk, “Pengaruh Dana Zakat Infak Dan Sedekah (ZIS) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh”, *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Public Indonesia*, Vol.6 No.2, November 2019, hlm. 212-213

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu 6 Provinsi yang ada di Pulau Jawa serta tahun yang dilakukan oleh penulis yakni tahun 2013-2019.

Penelitian humaira yang berjudul “Pengaruh ZIS dan Factor Makro Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyaluran dana zakat, infak, sedekah (ZIS), inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di negara Indonesia periode 2006-2018. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ZIS memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan berdasarkan pada uji t. uji F menunjukkan bahwa seluruh variabel secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2006-2018.<sup>52</sup> Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu 6 Provinsi yang ada di Pulau Jawa serta tahun yang dilakukan oleh penulis yakni tahun 2013-2019.

## **2. Penelitian Tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan**

Penelitian yang dilakukan oleh Lendetaring, dan Tolorang dengan judul pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran dan jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sanghe. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda.

---

<sup>52</sup> Ira Humaira Hany Dan Dina Islamiyati, Pengaruh ZIS dan Faktor Makro Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia, *Jurnal Ekonomi vol XXV No. 01*, Maret 2020, hlm. 118

Berdasarkan hasil penelitian variabel pertumbuhan ekonomi tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan, tingkat pengangguran memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan, dan jumlah penduduk juga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sanghe.<sup>53</sup> Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu terletak pada objek penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu 6 Provinsi yang ada di Pulau Jawa serta tahun yang dilakukan oleh peneliti yakni tahun 2013-2019 dan metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi data panel.

Penelitian yang dilakukan oleh Suryandari, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi DIY tahun 2004-2014. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Jenis data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). Dengan menggunakan analisis data panel dengan model *fixed effect*. Dengan hasil penelitian pertumbuhan ekonomi berpengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DIY, pendidikan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di DIY, dan kesehatan berpengaruh negative terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi DIY pada tahun 2004-2014.<sup>54</sup> Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, yaitu terletak

---

<sup>53</sup> Desy Lendetaring, Daisy S.M. Engka, Krest D. Tolosang, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Kab. Kepulauan Sanghe, *Jurnal Berkala Ilmiah*, Vol. 19 Nomor 2, 2019.

<sup>54</sup> Andri Nurmalita Suryandari, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, Dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Provinsi DIY Tahun 2004-2014, *Jurnal Pendidikan Dan Ekonomi*, Vol. 17 Nomor 1, hlm.1

pada objek penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu 6 Provinsi yang ada di Pulau Jawa serta tahun yang dilakukan oleh peneliti yakni tahun 2013-2019 dan metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi data panel.

Penelitian yang dilakukan oleh Insani dan Susilastuti, penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh ekonomi kreatif terhadap kemiskinan di enam Provinsi di Jawa. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi data panel untuk mengetahui hubungan variabel ekonomi kreatif dengan kemiskinan. Sumber data menggunakan data sekunder dari 6 Provinsi di Jawa periode 2010-2019, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ekonomi kreatif secara signifikan mampu menurunkan kemiskinan di Jawa.<sup>55</sup> Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada tahun penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu tahun 2013-2019.

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo, dengan tujuan untuk meneliti pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Provinsi, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa. Upah Minimum Provinsi memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap

---

<sup>55</sup> Dwi Roria Mauludin Insane, Yolanda, Darwati Susilastuti, Pengaruh Ekonomi Kreatif Terhadap Kemiskinan di Jawa, *Journal of Applied Business and Economic (JABE)*, Vol. 8 Nomor 3, Maret 2022, hlm. 352

jumlah penduduk miskin di Jawa. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negative dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa pada tahun 2012-2020.<sup>56</sup> Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada tahun penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu tahun 2013-2019.

### **3. Penelitian Tentang Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan**

Penelitian yang dilakukan oleh Aritonang dengan judul pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi pemerintah, investasi swasta dan tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa tahun 2011-2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu PDRB yang diperoleh dari BPS, pengeluaran pemerintah yang diukur dari belanja daerah yang diperoleh dari perhitungan APBD, investasi pemerintah berupa penyertaan modal daerah yang diperoleh dari Kajian Ekonomi Regional yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan periode pengamatan tahun 2011-2015. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan pengujian model penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah, investasi swasta dan tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Kevin Dwi Prasetyo, Zainal Arifin, Analisis Pengaruh TPT, UMP, Pertumbuhan Ekonomi, IPM Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Jawa, *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol. 6 Nomor 2, Mei 2022, hlm. 295

<sup>57</sup> Aria Langlang Buana, Herlina Juni Risma Saragih, Sovian Aritonang, Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Investasi Pemerintah, Investasi Swasta Dan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Tahun 2011-2015, *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, Vol. 4 Nomor 2, Agustus 2018, hlm. 3

Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada objek penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu 6 Provinsi di Pulau Jawa serta tahun yang dilakukan oleh penulis yakni tahun 2013-2019.

Penelitian yang dilakukan oleh Supratyoningsih, dengan judul pengaruh investasi, pengeluaran pemerintah, tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan di Provinsi Bali menunjukkan hasil bahwa investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Investasi dan pengeluaran pemerintah berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Investasi tidak berpengaruh secara langsung terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengeluaran pemerintah dan tenaga kerja berpengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.<sup>58</sup> Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada objek penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu 6 Provinsi di Pulau Jawa serta tahun yang dilakukan oleh penulis yakni tahun 2013-2019.

Penelitian yang dilakukan oleh Junaidi dengan judul pengaruh belanja pemerintah daerah terhadap kemiskinan dan pengangguran di Kota Batu tahun 2017-2020 menunjukkan hasil bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan dan pengeluaran pemerintah

---

<sup>58</sup> Lutfi Supratyoningsih, Ni Nyoman Yuliarmi, Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Bali, *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, Vol. 11 Nomor 01, Januari 2022, hlm.1

juga mempengaruhi pengangguran di Kota Batu tahun 2017-2020.<sup>59</sup> Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada objek penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu 6 Provinsi di Pulau Jawa serta tahun yang dilakukan oleh penulis yakni tahun 2013-2019

Penelitian yang dilakukan oleh Tolosang dengan judul pengaruh jumlah penduduk, pengangguran, produk domestic regional bruto dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Kota Bitung menunjukkan bahwa jumlah penduduk, pengangguran, PDRB dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kota Bitung dan variabel PDRB tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di Kota Bitung.<sup>60</sup> Perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu terletak pada objek penelitian yang akan dilakukan penulis, yaitu 6 Provinsi di Pulau Jawa serta tahun yang dilakukan oleh penulis yakni tahun 2013-2019.

#### **4. Penelitian Tentang Pengaruh Penyaluran Dana ZIS, Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan**

Penelitian Yuliana, et al yang berjudul “Pengaruh Dana Zakat Infak Dan Sedekah (ZIS) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten/Kota Provinsi Aceh Tahun 2013-2017”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) terhadap kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Aceh.

---

<sup>59</sup> Linda Wulandari, M. Cholid Mawardi, Junaidi, Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Terhadap Kemiskinan Dan Pengangguran Di Kota Batu Tahun 2017-2020, *E-Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, Vol. 11 Nomor 06, Agustus 2022, hlm. 23

<sup>60</sup> Berliana F. Tuwonaung, Een N. Walengko, Krest D. Tolosang, Pengaruh Jumlah Penduduk, Pengangguran, Produk Domestic Regional Bruto, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di Kota Bitung, *Jurnal Berkala Ilmiah*, Vol. 22 Nomor 06, Agustus 2022, hlm. 109

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel dengan menggunakan Eviews 9. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hasil bahwa dana ZIS memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Aceh.<sup>61</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo, dengan tujuan untuk meneliti pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Provinsi, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa. Upah Minimum Provinsi memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa. Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh negative dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Jawa pada tahun 2012-2020.<sup>62</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Tolosang dengan judul pengaruh jumlah penduduk, pengangguran, produk domestic regional bruto dan pengeluaran pemerintah terhadap kemiskinan di Kota Bitung menunjukkan bahwa jumlah penduduk, pengangguran, PDRB dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kota Bitung dan variabel PDRB tidak memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di Kota Bitung.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> Yuiana, *Pengaruh Dana Zakat Infak Dan Sedekah (ZIS)*..., hlm. 212-213

<sup>62</sup> Kevin Dwi Prasetyo, *Analisis Pengaruh TPT, UMP*..., hlm. 295

<sup>63</sup> Berliana F. Tuwonaung, *Pengaruh Jumlah* ..., hlm. 109

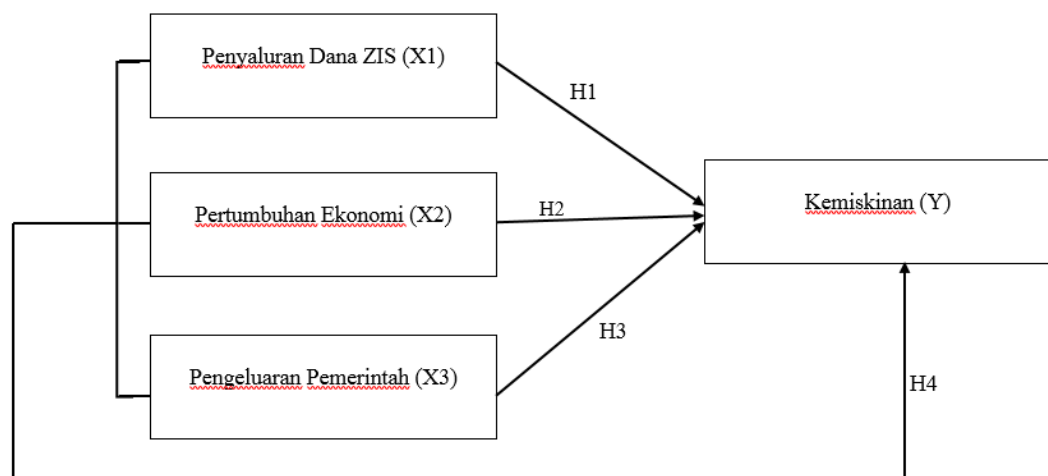


Dengan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa variabel ZIS, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah secara simultan memiliki pengaruh terhadap kemiskinan.

#### F. Kerangka Berfikir

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu mengenai hubungan antara variabel independen (ZIS, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah) dengan variabel dependen (Kemiskinan) diatas, maka unuk memudahkan penelitian dan memperjelas alur konseptual, maka peneliti merumuskan suatu kerangka konseptuan sebagai berikut:

**Gambar 2.1 Kerangka Berfikir**



Berdasarkan kerangka pada gambar 1.1 diatas, maka peneliti mencoba untuk menjabarkan maksud dari panah kerangka tersebut. Kerangka berfikir didalam penelitian ini didukung dengan adanya teori serta penelitian sebagai berikut:

1. Penyaluran dana zakat, infak, sedekah (ZIS) berpengaruh terhadap kemiskinan pada provinsi di Jawa dengan melihat hasil penelitian menggunakan regresi.

Didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh haidar<sup>64</sup>, wahyuningsih dan mahkrus<sup>65</sup>, Eris dkk<sup>66</sup>, yuliana dkk<sup>67</sup>, humaira dkk<sup>68</sup> serta diperkuat oleh teori Keynes<sup>69</sup>.

2. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan pada provinsi di Jawa dengan melihat hasil penelitian menggunakan regresi. Didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh lendetaring dkk<sup>70</sup>, suryandari<sup>71</sup>, insani dkk<sup>72</sup>, prasetyo<sup>73</sup>, serta diperkuat oleh teori Harrod Domar<sup>74</sup> dan teori *trickel-down effect*<sup>75</sup>.
3. Pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap kemiskinan pada provinsi di Jawa dengan melihat hasil penelitian menggunakan regresi. Didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh aritonang dkk<sup>76</sup>, supratyoningsih dkk<sup>77</sup>, junaidi dkk<sup>78</sup>, tolosang dkk<sup>79</sup>, serta diperkuat oleh teori Rostow dan Musgrave<sup>80</sup>, teori Peacock dan Wiseman<sup>81</sup>, teori Keynes<sup>82</sup>, dan teori Wagner<sup>83</sup>.

---

<sup>64</sup> M. Samsul Haidar, "Revitalisasi Pendistribusian .....", hlm. 1

<sup>65</sup> Wahyuningsih dan Mahkrus, "Pengelolaan Zakat Produktif .....", hlm. 1

<sup>66</sup> Eris, "Pengaruh Penyaluran Dana Zakat.....", hlm. 1

<sup>67</sup> Yuliana, "Pengaruh Dana Zakat.....", hlm. 1

<sup>68</sup> Humaira, "Pengaruh ZIS dan Faktor Mikro.....", hlm. 118

<sup>69</sup> P. Krugman, *The General of Theory Story*....., hlm. 27

<sup>70</sup> Lendetaring, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi.....", hlm.

<sup>71</sup> Suryandari, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi.....", hlm. 1

<sup>72</sup> Insani, "Pengaruh Ekonomi Kreatif.....", hlm. 352

<sup>73</sup> Prasetyo, "Pengaruh TPT.....", hlm. 295

<sup>74</sup> Jolyne Myrell Parera, *Aglomerasi Perekonomian*..., hlm. 14

<sup>75</sup> Tulus H. Tambunan, *Perekonomian Indonesia*....., hlm.113

<sup>76</sup> Aritonang, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah.....", hlm.3

<sup>77</sup> Supratyoningsih, "Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah.....", hlm.1

<sup>78</sup> Junaidi, "Pengaruh Belanja Pemerintah.....", hlm. 23

<sup>79</sup> Tolosang, "Pengaruh jumlah penduduk....", hlm. 109

<sup>80</sup> Prasetya et al., *Pengeluaran sector Publik*....., hlm. 99-116

<sup>81</sup> Guritno Mangkoesobroto, *Ekonomi Public*....., hlm. 120

<sup>82</sup> *Ibid*...., hlm. 179

<sup>83</sup> *Ibid*...., hlm. 180

4. Penyaluran dana zakat, infak dan sedekah (ZIS), pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama mempengaruhi kemiskinan dkk<sup>84</sup>, junaidi dkk<sup>85</sup>, tolosang dkk<sup>86</sup>, serta diperkuat oleh teori Rostow dan Musgrave<sup>87</sup>, teori Peacock dan Wiseman<sup>88</sup>, teori Keynes<sup>89</sup>, dan teori Wagner<sup>90</sup>.
5. Penyaluran dana zakat, infak dan sedekah (ZIS), pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran pemerintah secara bersama-sama mempengaruhi kemiskinan.

### G. Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. H1: Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS) (X1) memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan pada provinsi di Jawa.
2. H2: Pertumbuhan Ekonomi (X2) memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan pada provinsi di Jawa.
3. H3: Pengeluaran Pemerintah (X3) memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan pada provinsi di Jawa.
4. H4: Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS), Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada provinsi di Jawa.

---

<sup>84</sup> Supratyoningsih, "Pengaruh Investasi, Pengeluaran Pemerintah....", hlm.1

<sup>85</sup> Junaidi, "Pengaruh Belanja Pemerintah....", hlm. 23

<sup>86</sup> Tolosang, "Pengaruh jumlah penduduk....", hlm. 109

<sup>87</sup> Prasetya et al., *Pengeluaran sector Publik....*, hlm. 99-116

<sup>88</sup> Guritno Mangkoesobroto, *Ekonomi Public....*, hlm. 120

<sup>89</sup> *Ibid....*, hlm. 179

<sup>90</sup> *Ibid....*, hlm. 180